

**ANALISIS PENGARUH TENAGA KERJA TERDIDIK,
TENAGA KERJA TIDAK TERDIDIK, DAN REALISASI
BELANJA MODAL PEMERINTAH TERHADAP
PERTUMBUHAN EKONOMI
(STUDI KASUS: BARLINGMASCAKEB, SUBOSUKAWONOSRATEN,
DAN KEDUNGSEPUR)**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan program sarjana (S1)
pada program sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun oleh:

PHILIP ALI BACHTIAR

NIM. C2B008091

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2013

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Philip Ali Bachtiar

Nomor Induk Mahasiswa : C2B008091

Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/ IESP

Judul Skripsi : **ANALISIS PENGARUH TENAGA KERJA TERDIDIK, TENAGA KERJA TIDAK TERDIDIK, DAN REALISASI BELANJA MODAL PEMERINTAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI (STUDI KASUS: BARLINGMASCAKEB, SUDOSUKAWONOSRATEN, DAN KEDUNGSEPUR)**

Dosen Pembimbing : Prof. Dr. F.X. Sugiyanto, MS.

Semarang, 05 Juli 2013

Dosen Pembimbing,

(Prof. Dr. F.X. Sugiyanto, MS.)
NIP. 195810081986031002

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Philip Ali Bachtiar
Nomor Induk Mahasiswa : C2B008091
Fakultas / Jurusan : Ekonomika dan Bisnis / IESP
Judul Skripsi : **ANALISIS PENGARUH TENAGA KERJA TERDIDIK, TENAGA KERJA TIDAK TERDIDIK, DAN REALISASI BELANJA MODAL PEMERINTAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI (STUDI KASUS: BARLINGMASCAKEB, SUDOSUKAWONOSRATEN, DAN KEDUNGSEPUR)**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 2013

Tim Penguji

1. Prof. Dr. F.X. Sugiyanto, MS. (.....)
2. Dr. Dwisetia Poerwono, M.Sc. (.....)
3. Nenek Woyanti, SE., M.Si. (.....)

Mengetahui,

Pembantu Dekan I

(Anis Chariri, SE., M.Com., Ph.D., Akt.)

NIP. 196708091992031001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Philip Ali Bachtiar menyatakan bahwa skripsi dengan judul: “ANALISIS PENGARUH TENAGA KERJA TERDIDIK, TENAGA KERJA TIDAK TERDIDIK, DAN REALISASI BELANJA MODAL PEMERINTAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI (Studi Kasus: Barlingmascakeb, Sudosukowonosraten, dan Kedungsepur)”, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah – olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah – olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 05 Juli 2013

Yang membuat pernyataan,

(Philip Ali Bachtiar)
NIM: C2B 008 091

ABSTRACT

Three regionalization in Central Java which have a big region is Barlingmascakeb, Subosukawonosraten, and Kedungsepur. each regionalization be expected to collaborate for more equatable development. The purpose of this research is making estimation about the role of Educated and Uneducated Labor, and also Realization of Government Capital Expenditure related to economic growth in three regionalization. The other reason is describing the growth patern of three regionalization.

The method of research uses economic development theory of Cobb – Douglas. Regression analysis is used Least Square Dummy Variables with the help of software EViews 6.

This research show that the improvement of economic growth in Barlingmascakeb depend on educated labor and realization of government capital expenditure, but uneducated labor has a negative effect. Whereas, improvement of economic growth in Subosukawonosraten depend on Educated and Uneducated Labor. However, realization of government capital expenditure in Subosukawonosraten has negative effect to economic growth. Whereas, improvement of economic growth in Kedungsepur isn't depend on educated labor. uneducated labor and realization of government, because the three independent variables has negative effect to economic growth. For the growth patern, Barlingmascakeb and Subosukawonosraten are on low growth and low income category, while Kedungsepur is on high income but low growth category.

Keywords: Economic Growth, Educated labor, Uneducated Labor, and Realization of Government Capital Expenditure

ABSTRAKSI

Tiga wilayah regionalisasi di Jawa Tengah yang memiliki luas wilayah yang besar adalah Barlingmascakeb, Subosukawonosraten, dan Kedungsepur Masing – masing dari tiga wilayah regionalisasi yang memiliki luas wilayah yang besar tersebut, diharapkan dapat menjalin kerja sama yang baik sehingga pembangunan yang merata dapat diwujudkan di masing – masing wilayah regionalisasi. Tujuan pertama dari penelitian ini adalah untuk mengestimasi pengaruh tenaga kerja terdidik dan tidak terdidik, serta realisasi belanja modal pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di tiga wilayah regionalisasi tersebut. Tujuan kedua adalah untuk mendeskripsikan pola pertumbuhan pada ketiga wilayah regionalisasi tersebut.

Penelitian ini menggunakan teori pertumbuhan ekonomi Solow – Swan yang dimodifikasi oleh Cobb – Douglas. Analisis regresi yang digunakan adalah *Least Square Dummy Variable* dengan bantuan perangkat lunak EViews 6.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di Barlingmascakeb tenaga kerja terdidik, dan realisasi belanja modal pemerintah berpengaruh positif terhadap laju pertumbuhan ekonomi, sedangkan tenaga kerja tidak terdidik berpengaruh negatif. Di Subosukawonosraten, tenaga kerja terdidik dan tidak terdidik berpengaruh positif terhadap laju pertumbuhan ekonomi. Namun, Realisasi belanja modal pemerintah Subosukawonosraten berpengaruh negatif. di Kedungsepur tenaga kerja terdidik, tidak terdidik, dan realisasi belanja modal pemerintah berpengaruh negatif pada laju pertumbuhan ekonomi. Untuk pola pertumbuhan, Barlingmascakeb dan Subosukawonosraten berada pada kategori daerah tertinggal, sedangkan Kedungsepur berada pada kategori daerah makmur yang sedang menurun (potensi untuk tertinggal).

Kata kunci: pertumbuhan ekonomi, tenaga kerja terdidik, tenaga kerja tidak terdidik, realisasi belanja modal pemerintah, Barlingmascakeb, Subosukawonosraten, Kedungsepur

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Analisis Pengaruh Tenaga Kerja Terdidik, Tenaga Kerja Tidak Terdidik, Dan Realisasi Belanja Modal Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus: Barlingmascakeb, Sudosukowonosraten, Kedungsepur)*”. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu Universitas Diponegoro Semarang. Penulis menyadari bahwa selama penyusunan skripsi ini banyak mengalami hambatan. Namun, berkat doa, bimbingan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untuk itu secara khusus penulis mengucapkan terima kasih yang setulus – tulusnya kepada:

1. Kedua Orang Tua penulis, Yusup dan Dwi Naningsih, serta adik penulis, Kelly Dwi yang telah memberikan doa, dukungan moral, kepercayaan, serta segala bentuk dukungan lainnya yang telah diberikan kepada penulis selama ini.
2. Drs. H. M. Nasir, M,Si, Akt, Phd selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
3. Prof. Dr. FX. Sugiyanto, MS selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk berdiskusi, memotivasi, memberikan masukan – masukan dan saran yang sangat bermanfaat bagi kelancaran penulisan skripsi ini.
4. Dra. Tri Wahyu Rejekiningsih, M.Si. selaku dosen wali yang banyak memberikan bimbingan, pengarahan, dan motivasi selama penulis menjalani studi di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
5. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan yang telah membukakan cakrawala ilmiah kepada penulis selama proses perkuliahan.

6. Keluarga besar KJS (Rangga “Tebo”, Anggryan “Gendut”, Nopan, Aziz, Lukas, Mahyar, Fatih, Rega, dan Aji), Keluarga besar TS (Andhika “Aren”, Bayu “BB”, Edo, Ubas, Khae, dan lain – lain), dan keluarga besar S33 (Evel, Wisse, dan lain – lain) atas doa dan dukungan moral, serta memberikan hari – hari yang menyenangkan selama di Semarang.
7. Keluarga besar IESP 2008 Reguler 2 (Adelino, Andhika, Berlian, Firza, Iqbal, Gerhard, Isty, Leo, Haniz, Ketut, Andi, Hera, Muzi, Tito, Rekha, Ochi, Ryan, Wanti, dan Yanuar) yang telah banyak membantu penulis selama proses perkuliahan dan penulisan skripsi.
8. Rian, Ari, Trulyn, Huda “Bobi”, Winda, Dien, dan Dini yang telah memberikan masukan untuk skripsi kepada penulis, dan dukungan moral, serta membuat sesi bimbingan menjadi lebih menyenangkan.
9. Om Taufik, Mas Rusli, Mas Bambang, dan Mba Sendy yang telah membantu dalam memecahkan masalah pada skripsi ini.
10. Keluarga besar Ksatria (Abdil, Rezza, Hanggoro, Diky, Fauzi, Bayu, Huda, Taufik, dan lain – lain) atas dukungan dan motivasi yang telah diberikan pada penulis.
11. Taylor Momsen dan Gareth Bale yang telah memberikan inspirasi bagi penulis untuk menjadi diri sendiri, untuk menciptakan impian, dan berjuang untuk mewujudkan impian tersebut.

Penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan banyak kelemahan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik atas skripsi ini.

Semarang, 05 Juli 2013

Penulis

(Philip Ali Bachtiar)
NIM: C2B 008 091

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
ABSTRAKS	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.1.1 Barlingmascakeb	5
1.1.2 Subosukawonosraten.....	9
1.1.3 Kedungsepur	13
1.2 Pernyataan Masalah Penelitian.....	18
1.3 Tujuan Penelitian.....	19
1.4 Manfaat Penelitian.....	19
1.5 Sistematika Penulisan	20
BAB II TELAAH PUSTAKA	22
2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu	22
2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi	22
2.1.2 Telaah terhadap Teori Pertumbuhan Ekonomi	25
2.1.2.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi NeoKlasik.....	25
2.1.3 Tenaga Kerja.....	27
2.1.3.1 Hubungan Tenaga Kerja Terdidik dengan Pertumbuhan Ekonomi.....	28
2.1.3.2 Hubungan Tenaga Kerja Tidak Terdidik dengan Pertumbuhan Ekonomi.....	29
2.1.4 Realisasi Belanja Modal Pemerintah.....	31
2.1.4.1 Hubungan Belanja Modal Pemerintah dengan Pertumbuhan Ekonomi.....	31
2.1.5 Pola Pertumbuhan Ekonomi	33
2.2 Penelitian Terdahulu	33
2.3 Kerangka Pemikiran Penelitian	35
2.4 Hipotesis	38

5.1.4 Pola Pertumbuhan Ekonomi di Tiga Wilayah Regionalisasi	90
5.2 Keterbatasan	90
5.3 Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN	97

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000 di Barlingmascakeb, Tahun 2007 – 2010	5
Tabel 1.2 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Barlingmascakeb yang Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Termasuk Angkatan Kerja menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan 2007 – 2010	6
Tabel 1.3 Realisasi Belanja Modal Pemerintah dalam Harga Konstan 2000 dan Laju Pertumbuhannya di Barlingmascakeb 2007 – 2010	8
Tabel 1.4 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000 di Subosukawonosraten, Tahun 2007 – 2010	9
Tabel 1.5 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Subosukawonosraten yang Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Termasuk Angkatan Kerja menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan 2007 – 2010	10
Tabel 1.6 Realisasi Belanja Modal Pemerintah dalam Harga Konstan 2000 dan Laju Pertumbuhannya di Subosukawonosraten 2007 – 2010	12
Tabel 1.7 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000 Kabupaten/Kota Di Kedungsepur Tahun 2007 – 2010	14
Tabel 1.8 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kedungsepur yang Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Termasuk Angkatan Kerja menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan 2007 – 2010	15
Tabel 1.9 Realisasi Belanja Modal Pemerintah dalam Harga Konstan 2000 dan Laju Pertumbuhannya di Kedungsepur 2007 – 2010.....	17
Tabel 3.1 Klasifikasi Pola Pertumbuhan Ekonomi Menurut Tipologi <i>Klassen</i>	54
Tabel 4.1 Hasil Uji Statistik Regresi Barlingmascakeb	58
Tabel 4.2 Hasil Uji Asumsi Klasik Regresi Barlingmascakeb	60
Tabel 4.3 Hasil Uji Statistik Regresi Subosukawonosraten.....	66
Tabel 4.4 Hasil Uji Asumsi Klasik Regresi Subosukawonosraten	68
Tabel 4.5 Hasil Uji Statistik Regresi Kedungsepur	73
Tabel 4.6 Uji Asumsi Klasik Regresi Kedungsepur	75
Tabel 4.7 Hasil Analisis Tipologi <i>Klassen</i> Wilayah Regionalisasi Barlingmascakeb.....	79

Tabel 4.8 Hasil Analisis Tipologi <i>Klassen</i> Wilayah Regionalisasi Subosukawonosraten.....	80
Tabel 4.9 Hasil Analisis Tipologi <i>Klassen</i> Wilayah Regionalisasi Kedungsepur.	81
Tabel 4.10 Klasifikasi Pola Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Regionalisasi Barlingmascakeb, Subosukawonosraten, dan Kedungsepur	82

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 4.1 Peta Rencana Perwilayahan (Wilayah regionalisasi) Provinsi Jawa Tengah	48

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran A <i>Least Square Dummy Variable</i> Barlingmascakeb.....	97
Lampiran B Uji Normalitas Regresi Barlingmascakeb	97
Lampiran C Uji Multikolinearitas Regresi Barlingmascakeb	98
Lampiran D Uji Heteroskedastis Regresi Barlingmascakeb	100
Lampiran E Uji Autikorelasi Regresi Barlingmascakeb.....	101
Lampiran F Data Yang Digunakan Regresi Barlingmascakeb	102
Lampiran G <i>Least Square Dummy</i> Subosukawonosraten.....	103
Lampiran H Uji Normalitas Regresi Subosukawonosraten	103
Lampiran I Uji Multikolinearitas Regresi Subosukawonosraten	104
Lampiran J Uji Heteroskedastis Regresi Subosukawonosraten	106
Lampiran K Uji Autokorelasi Regresi Subosukawonosraten.....	107
Lampiran L Data yang Digunakan Regresi Subosukawonosraten	108
Lampiran M <i>Least Square Dummy Model</i> Kedungsepur	110
Lampiran N Uji Normalitas Regresi Kedungsepur	111
Lampiran O Uji Multikolinearitas Regresi Kedungsepur	111
Lampiran P Uji Heteroskedastis Regresi Kedungsepur.....	113
Lampiran Q Uji Autokorelasi Regresi Kedungsepur.....	114
Lampiran R Data yang Digunakan Kedungsepur.....	115
Lampiran S Penelitian Terdahulu	117
Lampiran T LQ Barlingmascakeb Tahun 2007 – 2010	126
Lampiran U LQ Subosukawonosraten Tahun 2007 – 2010.....	127
Lampiran V LQ Kedungsepur Tahun 2007 – 2010	128

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada hakekatnya, setiap negara memiliki tujuan untuk membangun perekonomiannya. Pembangunan ekonomi menurut Todaro (2006), merupakan usaha pemerintah untuk meningkatkan produk nasional bruto (*Gross National Product, GNP*), dan pendapatan per kapita (*Income Per Capita*) serta penghapusan atau pengurangan tingkat kemiskinan absolut, penanggulangan ketimpangan pendapatan, dan penyediaan lapangan kerja. Pendapat Todaro tersebut menyiratkan, bahwa pembangunan ekonomi tidak hanya berkaitan dengan ekonomi, namun berkaitan dengan aspek – aspek kehidupan didalam masyarakat.

Pembangunan ekonomi secara nasional tidak dapat tercapai tanpa adanya pembangunan ekonomi di setiap daerah. Pembangunan ekonomi di setiap daerah bertujuan mencapai sasaran pembangunan sesuai dengan potensi, aspirasi, serta permasalahan pembangunan di daerah. Pembangunan daerah ini mencakup seluruh kegiatan pembangunan daerah dan sektoral yang berlangsung di daerah yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat (Nugroho dan Rokhmin Dahuri dikutip dari Yuliarmi, 2008). Salah satu pendorong pembangunan ekonomi di setiap daerah adalah laju pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB). Namun, laju pertumbuhan yang tinggi saja tidak dapat dikatakan telah terjadi pembangunan, melainkan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas serta merata yang dapat menjadi syarat cukup bagi pembangunan

(Prasetyo, 2011). Laju pertumbuhan yang berkualitas yang telah disebutkan Prasetyo merupakan laju pertumbuhan yang dapat dirasakan oleh setiap kalangan masyarakat. Laju pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai perkembangan yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah (Sukirno, 2004). Untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, dibutuhkan faktor produksi sebagai faktor yang dapat mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi. Faktor produksi tersebut adalah modal, tenaga kerja, dan teknologi (Mankiw, 2006). Menurut Abramovits dan Solow (dalam Sukirno, 2004), faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pertumbuhan modal, tingkat pertumbuhan penduduk (tenaga kerja), dan perkembangan teknologi. Selain itu, Sukirno (2004) menjabarkan lebih spesifik lagi mengenai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi:

“Kestabilan politik, kebijakan ekonomi pemerintah, kekayaan alam yang dimiliki, jumlah dan kemampuan tenaga kerja, tersedianya usahawan yang gigih dan kemampuan mengembangkan dan menggunakan teknologi modern adalah beberapa faktor penting yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.”

Menurut Sumarsono (2009), untuk memacu pertumbuhan ekonomi di negara berkembang seperti Indonesia, diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas yang ditentukan oleh tingkat pendidikannya. pendidikan dan latihan tidak hanya meningkatkan pengetahuan tetapi, meningkatkan keterampilan kerja yang akan meningkatkan produktivitas kerja. Selain itu, peranan tenaga terampil dan berpendidikan akan memodernisasi perekonomian, karena tenaga kerja yang terampil dan berpendidikan mampu menguasai teknologi yang membantu dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi (Sukirno, 2004). Todaro (2006) juga

mengemukakan bahwa sumber daya manusia yang memiliki pendidikan tinggi, akan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui terciptanya angkatan kerja yang lebih produktif, tersedianya kesempatan kerja yang lebih luas, terciptanya kelompok pemimpin terdidik, dan terciptanya sikap – sikap modern di berbagai lapisan masyarakat. Tenaga kerja yang memiliki pendidikan yang tinggi dapat memberikan inovasi yang akan mempermudah kegiatan ekonomi dan meningkatkan produktivitas.

Selain kualitas tenaga kerja, pemerintah juga memainkan peran penting bagi terciptanya peningkatan pada laju pertumbuhan ekonomi. Salah satu peran penting tersebut adalah pengelolaan pengeluaran konsumsi pemerintah. Menurut Anaman (dikutip dalam Rustiono, 2008) menyatakan bahwa:

“Pengeluaran konsumsi pemerintah yang terlalu kecil akan merugikan pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah yang proporsional akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan pengeluaran konsumsi pemerintah yang boros akan menghambat pertumbuhan ekonomi.”

Salah satu pengeluaran pemerintah yang mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi secara langsung adalah belanja modal pemerintah, yang termasuk komponen belanja pembangunan (belanja langsung). Menurut Kunarjo (dikutip dari Yuliarmi, 2008) belanja pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi dalam proyek – proyek yang mengacu pada pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, peningkatan kesejahteraan, dan program yang menyentuh langsung kawasan yang terbelakang. Pernyataan Kunarjo tersebut membuktikan bahwa belanja modal pemerintah merupakan tolok ukur dari salah satu usaha yang dilakukan pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi.

Selain faktor pendukung pertumbuhan ekonomi, ada faktor yang dapat menghambat laju pertumbuhan ekonomi, salah satunya adalah perbedaan sumber daya yang tersedia di setiap daerahnya. Tanpa adanya kerja sama diantara setiap daerah akan mengakibatkan ketimpangan. Untuk itulah pemerintah memberlakukan peraturan daerah mengenai sistem perwilayahan atau wilayah regionalisasi yang dibukukan dalam perda Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW), agar tercapai kerja sama antara satu daerah dengan daerah lainnya pada suatu wilayah tertentu, sehingga dapat tercapai pemerataan pembangunan.

Di Provinsi Jawa Tengah, peraturan daerah mengenai Rencana Tata Ruang dan Wilayah, dibukukan dalam perda RTRW nomor 6 tahun 2010, khususnya pada pasal 17 mengenai sistem perwilayahan atau wilayah regionalisasi. Salah satu tujuan pasal tersebut adalah “Sebagai arahan umum bagi para pelaku pembangunan di Provinsi Jawa Tengah tentang keterkaitan fungsional kota – kota dan *hinterland* (daerah pinggiran) yang ada di Jawa Tengah” (RTRW Provinsi Jawa Tengah 2009 – 2029). Wilayah regionalisasi tersebut terbentuk berdasarkan interaksi yang terjadi di antara daerah – daerah dalam cakupan wilayah tertentu.

Bentuk nyata dari pasal 17 peraturan daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 6 tahun 2010 adalah, dibentuknya beberapa wilayah regionalisasi, dan menghasilkan tiga wilayah regionalisasi yang memiliki luas wilayah yang besar dibandingkan wilayah regionalisasi lainnya, diantaranya yaitu, Barlingmascakeb (Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, dan Kebumen), Subosukawonosraten (Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Sragen, dan Klaten), dan Kedungsepur (Kendal, Demak, Ungaran, Kota

Semarang, dan Purwodadi). Masing – masing dari tiga wilayah regionalisasi yang memiliki luas wilayah yang besar tersebut, diharapkan dapat menjalin kerja sama yang baik sehingga pembangunan yang merata dapat diwujudkan di masing – masing wilayah regionalisasi.

1.1.1 Barlingmascakeb

Barlingmascakeb merupakan wilayah regionalisasi yang terdiri dari Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Kebumen. Kondisi laju pertumbuhan ekonomi di regionalisasi Barlingmascakeb disajikan pada tabel 1.1.

Tabel 1.1
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Bruto
Atas Dasar Harga Konstan 2000 di Barlingmascakeb, Tahun 2007 – 2010
(Persen)

Kabupaten/Kota	2007	2008	2009	2010	Rata - Rata
Kab. Cilacap	4,87	4,92	5,25	5,65	5,16
Kab. Banyumas	5,30	5,38	5,49	5,77	5,48
Kab. Purbalingga	6,19	5,30	5,61	5,67	5,68
Kab. Banjarnegara	5,01	4,98	5,11	4,89	5,00
Kab. Kebumen	4,52	5,80	3,94	4,15	4,55
Rata - Rata	5,15	5,27	5,04	5,19	5,16

Sumber: PDRB Kab/Kota Jawa Tengah, BPS Jawa Tengah (diolah)

Pada tabel 1.1, disebutkan bahwa beberapa kabupaten di Barlingmascakeb memiliki pertumbuhan ekonomi yang meningkat setiap tahunnya dan beberapa kabupaten lainnya mengalami fluktuasi setiap tahun selama 2007 – 2010. Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Banyumas merupakan kabupaten yang memiliki peningkatan pertumbuhan ekonomi sepanjang periode 2007 – 2010. Sedangkan Kabupaten yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang fluktuatif adalah Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten

Kebumen. Jika dibandingkan dengan rata – rata laju pertumbuhan ekonomi di Barlingmascakeb, Kabupaten Cilacap, Banjarnegara, dan Kabupaten Kebumen memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dibandingkan Barlingmascakeb, Sedangkan Kabupaten Banyumas, dan Purbalingga memiliki rata – rata laju pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan dengan rata – rata laju pertumbuhan Barlingmascakeb.

Perbedaan kondisi perekonomian yang terjadi di setiap daerah di Barlingmascakeb dapat disebabkan oleh kondisi faktor – faktor pertumbuhan ekonomi, diantaranya yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu kondisi tenaga kerja. Dukungan yang diberikan tenaga kerja dipengaruhi oleh kualitasnya, apakah tenaga kerja tersebut memiliki keahlian dan memberikan produktivitas yang tinggi atau tenaga kerja yang hanya mengandalkan tenaga saja (tidak memiliki keahlian) dan memberikan produktivitas yang rendah. Untuk itu disajikan kondisi tenaga kerja terdidik dan tenaga kerja tidak terdidik di Barlingmascakeb pada periode 2007 – 2010 pada tabel 1.2.

Tabel 1.2
Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Barlingmascakeb yang Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Termasuk Angkatan Kerja menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan 2007 – 2010

Kabupaten/Kota	Tenaga Kerja Terdidik					
	2008	Laju (%)*	2009	Laju (%)	2010	Laju (%)
Kab. Cilacap	140.866	7,99	156.001	10,74	171.865	10,17
Kab. Banyumas	161.155	23,33	174.888	8,52	190.360	8,85
Kab. Purbalingga	50.743	-5,29	57.985	14,27	63.591	9,67
Kab. Banjarnegara	60.841	4,22	64.193	5,51	62.715	-2,30
Kab. Kebumen	99.834	24,98	102.154	2,32	96.177	-5,85
Rata - Rata		11,05		8,27		4,11

Keterangan: Dilanjutkan ke tabel berikutnya

Lanjutan:

Kabupaten/Kota	Tenaga Kerja Tidak Terdidik					
	2008	Laju (%)*	2009	Laju (%)	2010	Laju (%)
Kab. Cilacap	602.424	-11,37	622.659	3,36	590.482	-5,17
Kab. Banyumas	554.686	-6,24	565.154	1,89	601.652	6,46
Kab. Purbalingga	359.773	-2,76	363.482	1,03	372.007	2,35
Kab. Banjarnegara	397.089	-5,51	389.467	-1,92	404.359	3,82
Kab. Kebumen	476.995	-13,16	504.186	5,70	488.507	-3,11
Rata - Rata		-7,81		2,01		0,87

Sumber: Statistik Ketenagakerjaan Jawa Tengah, BPS Jawa Tengah (diolah)

Keterangan: * = Pertumbuhan Tenaga Kerja 2007 - 2008

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa rata – rata laju pertumbuhan di Barlingmascakeb terus meningkat setiap tahunnya pada periode 2007 – 2010. Hal tersebut berbeda dengan kondisi di setiap daerahnya, pertumbuhan tenaga kerja terdidik di Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Banyumas memiliki pergerakan yang terus meningkat, hal tersebut yang menjadi faktor pertumbuhan yang positif pada laju pertumbuhan ekonomi di kedua kabupaten tersebut, pada periode 2007 - 2010. Sedangkan, pertumbuhan tenaga kerja terdidik yang fluktuatif di Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Kebumen memberikan pengaruh yang fluktuatif. Hal itu berpengaruh pada laju pertumbuhan di ketiga daerah tersebut yang juga bergerak fluktuatif.

Pada tabel 1.2 juga menunjukkan jumlah tenaga kerja tidak terdidik masih mendominasi di Barlingmascakeb. Walaupun terjadi penurunan rata – rata pertumbuhan pada tahun 2008, namun terus meningkat pada tahun 2009 dan 2010. Hal tersebut dapat memberikan produktivitas yang rendah, dan menghambat laju pertumbuhan ekonomi. Dukungan pemerintah melalui program Bantuan

Operasional Sekolah (BOS), belum memberikan pengaruh terhadap kenaikan jumlah tenaga kerja terdidik di Barlingmascakeb.

Selain tenaga kerja, telah disebutkan sebelumnya bahwa pemerintah juga memainkan peran penting untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal. Tabel 1.3 memperlihatkan realisasi belanja modal pemerintah daerah di Barlingmascakeb.

Tabel 1.3
Realisasi Belanja Modal Pemerintah dalam Harga Konstan 2000 dan Laju Pertumbuhannya di Barlingmascakeb 2007 – 2010 (dalam Ribuan Rupiah)

Kabupaten/ Kota	2008	Laju (%)*	2009	Laju (%)	2010	Laju (%)
Kab. Cilacap	102.298.368	-31,85	66.870.803	-34,63	139.984.752	109,34
Kab. Banyumas	56.879.862	-13,39	54.886.865	-3,50	37.227.518	-32,17
Kab. Purbalingga	66.484.755	19,02	43.419.078	-34,69	15.600.073	-64,07
Kab. Banjarnegara	50.996.589	-14,68	29.307.518	-42,53	56.065.133	91,30
Kab. Kebumen	59.018.862	-46,99	60.342.258	2,24	42.901.525	-28,90
Rata - Rata		-17,58		-22,62		15,10

Sumber: Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota, BPS Jawa Tengah dan Biro Keuangan Daerah, Provinsi Jawa Tengah

Keterangan: * = Pertumbuhan Realisasi Belanja Modal 2007 - 2008

Pada tabel 1.3, pertumbuhan rata – rata realisasi belanja modal pemerintah di Barlingmascakeb terlihat bergerak fluktuatif. Pada tahun 2008 dan 2009 pertumbuhan rata – rata realisasi belanja modal pemerintah menurun, namun pertumbuhannya meningkat pada tahun 2010. Jika ditinjau dari kondisi di masing – masing daerah, Kabupaten Banyumas memiliki pergerakan realisasi belanja modal pemerintah yang terus menurun pada periode 2007 – 2010. Namun di

empat kabupaten lainnya, terlihat pertumbuhan rata – rata realisasi belanja modal pemerintah bergerak fluktuatif. Hal tersebut dapat disebabkan tidak terserapnya anggaran belanja modal secara proporsional, atau dapat disebabkan oleh kebutuhan setiap daerah yang berbeda – beda setiap tahunnya.

1.1.2 Subosukawonosraten

Subosukawonosraten adalah wilayah regionalisasi yang terdiri dari Kabupaten Boyolali, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Sragen, Klaten, dan Kota Surakarta. Kondisi laju pertumbuhan ekonomi di Subosukawonosraten yang ditunjukkan dengan laju pertumbuhan PDRB di setiap kabupaten/kota, disajikan pada tabel 1.4.

Tabel 1.4
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Bruto
Atas Dasar Harga Konstan 2000 di Subosukawonosraten, Tahun 2007 – 2010
(Persen)

Kabupaten/Kota	2007	2008	2009	2010	Rata – Rata
Kab. Boyolali	4,08	4,04	5,16	3,60	4,18
Kab. Klaten	3,31	3,93	4,24	1,73	3,13
Kab. Sukoharjo	5,11	4,84	4,76	4,65	4,84
Kab. Wonogiri	5,07	4,27	4,73	3,14	4,23
Kab. Karanganyar	5,74	5,30	5,54	5,42	5,50
Kab. Sragen	5,73	5,69	6,01	6,06	5,87
Kota Surakarta	5,82	5,69	5,90	5,94	5,84
Rata - Rata	4,89	4,77	5,16	4,05	4,70

Sumber: PDRB Kab/Kota Jawa Tengah, BPS Jawa Tengah (diolah)

Pada tabel 1.4 rata – rata laju pertumbuhan Subosukawonosraten bergerak fluktuatif. Namun, hanya pada tahun 2010 laju pertumbuhan ekonomi Subosukawonosraten mencapai rata – rata yang lebih rendah dibandingkan rata –

rata dalam periode 2007 – 2010. Jika dilihat kondisi laju pertumbuhan di masing – masing daerah, terlihat ada tiga kabupaten yang memiliki rata – rata laju pertumbuhan kurang dari rata – rata laju pertumbuhan Subosukawonosraten, yaitu Kabupaten Boyolali, Klaten dan Wonogiri. Kabupaten/kota yang termasuk daerah yang memiliki rata – rata laju pertumbuhan ekonomi di atas rata – rata laju pertumbuhan ekonomi Subosukawonosraten adalah Kabupaten Sukoharjo, Karanganyar, Sragen, dan Kota Surakarta. Namun pergerakan laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sukoharjo terlihat terus menurun, dibandingkan kabupaten/kota lain yang bergerak fluktuatif. Pergerakan laju pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan Subosukawonosraten dapat dipengaruhi kondisi tenaga kerjanya. Pada tabel 1.5, ditunjukkan kondisi tenaga kerja di Subosukawonosraten yang dibedakan menjadi tenaga kerja terdidik dan tenaga kerja tidak terdidik.

Tabel 1.5
Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Subosukawonosraten yang Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Termasuk Angkatan Kerja menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan 2007 – 2010

Kabupaten/ Kota	Tenaga Kerja Terdidik					
	2008	Laju (%)*	2009	Laju (%)	2010	Laju (%)
Kab. Boyolali	132.353	2,45	131.573	-0,59	130.983	-0,45
Kab. Klaten	230.210	7,72	250.454	8,79	238.980	-4,58
Kab. Sukoharjo	165.884	1,20	165.358	-0,32	175.083	5,88
Kab. Wonogiri	87.838	15,00	95.927	9,21	89.360	-6,85
Kab. Karanganyar	122.018	7,57	147.328	20,74	146.065	-0,86
Kab. Sragen	114.917	17,92	123.286	7,28	123.921	0,52
Kota Surakarta	158.051	5,07	170.426	7,83	154.316	-9,45
Rata - Rata		8,13		7,56		-2,26

Keterangan: Dilanjutkan ke tabel

Lanjutan:

Kabupaten/ Kota	Tenaga Kerja Tidak Terdidik					
	2008	Laju (%)*	2009	Laju (%)	2010	Laju (%)
Kab. Boyolali	404.492	-8,73	410.960	1,60	396.598	-3,49
Kab. Klaten	382.434	-9,47	366.718	-4,11	335.569	-8,49
Kab. Sukoharjo	281.991	-8,22	286.059	1,44	257.443	-10,00
Kab. Wonogiri	469.654	-4,65	484.108	3,08	430.342	-11,11
Kab. Karanganyar	329.126	-6,45	308.118	-6,38	311.691	1,16
Kab. Sragen	361.399	-11,15	371.670	2,84	359.605	-3,25
Kota Surakarta	119.624	-12,70	105.120	-12,12	104.257	-0,82
Rata - Rata		-8,77		-1,95		-5,14

Sumber: Statistik Ketenagakerjaan Jawa Tengah, BPS Jawa Tengah (diolah)
Keterangan: * = Pertumbuhan Tenaga Kerja 2007 – 2008

Pada tabel 1.5 diatas menunjukkan kabupaten/kota di Subosukawonosraten memiliki rata – rata pertumbuhan tenaga kerja terdidik yang terus meningkat selama periode 2007 – 2009, namun terjadi penurunan tahun 2010. Tidak berbeda dengan kondisi pertumbuhan tenaga kerja di masing – masing daerah yang juga bergerak fluktuatif, kecuali Kabupaten Sragen yang memiliki pertumbuhan tenaga kerja terdidik yang positif setiap tahunnya. Lain halnya dengan rata – rata pertumbuhan tenaga kerja tidak terdidik di Subosukawonosraten, setiap tahunnya mengalami penurunan. Walaupun terjadi penurunan, jumlah tenaga kerja tidak terdidik yang tercatat masih lebih besar dibandingkan tenaga kerja terdidik di Subosukawonosraten. Jika dilihat di masing – masing daerah, hanya Kabupaten Klaten dan Kota Surakarta yang memiliki pertumbuhan tenaga kerja tidak terdidik yang terus menurun, diduga sedang terjadi pembangunan sumber daya manusia di kedua kabupaten/kota tersebut.

Selain faktor tenaga kerja, telah dikemukakan sebelumnya bahwa belanja modal merupakan salah satu peran pemerintah untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Maka, pada tabel 1.6 ditunjukkan kondisi realisasi belanja modal pemerintah di Subosukawonosraten.

Tabel 1.6
Realisasi Belanja Modal Pemerintah dalam Harga Konstan 2000
dan Laju Pertumbuhannya di Subosukawonosraten 2007 – 2010 (dalam
Ribuan Rupiah)

Kabupaten/ Kota	2008	Laju (%)*	2009	Laju (%)	2010	Laju (%)
Kab. Boyolali	45.924.330	-37,46	32.789.846	-28,60	36.157.537	10,27
Kab. Klaten	53.279.576	-17,51	25.924.562	-51,34	14.499.606	-44,07
Kab. Sukoharjo	41.522.080	-27,33	20.720.568	-50,10	22.441.263	8,30
Kab. Wonogiri	53.231.983	24,45	32.012.485	-39,86	37.317.133	16,57
Kab. Karanganyar	55.274.011	10,73	23.194.539	-58,04	37.983.868	63,76
Kab. Sragen	62.895.625	-22,33	38.712.068	-38,45	31.195.366	-19,42
Kota Surakarta	60.336.570	2,13	31.004.458	-48,61	28.810.993	-7,07
Rata - Rata		-9,62		-45,00		4,05

Sumber: Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota, BPS Jawa Tengah dan Biro Keuangan Daerah, Provinsi Jawa Tengah

Keterangan: * = Pertumbuhan Realisasi Belanja Modal 2007 - 2008

Tabel 1.6 menunjukkan pertumbuhan rata – rata realisasi belanja modal pemerintah yang terjadi di Subosukawonosraten mengalami pergerakan yang fluktuatif. Pada tahun 2008 pertumbuhan realisasi belanja modal mengalami penurunan, namun penurunan pertumbuhan paling rendah terjadi pada tahun 2009 yang diakibatkan oleh penurunan pertumbuhan realisasi belanja modal pemerintah yang terjadi di setiap kabupaten/kota. Pada tahun 2010, rata – rata pertumbuhan realisasi belanja modal pemerintah mengalami kenaikan, diakibatkan beberapa

kabupaten mengalami peningkatan. Pada tabel 1.6 juga terlihat lima kabupaten/kota di wilayah regionalisasi tersebut mengalami pertumbuhan realisasi belanja modal pemerintah yang fluktuatif, kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar, dan Kota Surakarta. Di samping itu, ada dua kabupaten mengalami penurunan selama periode 2007 – 2010 yaitu, Kabupaten Klaten dan Kabupaten Sragen. Kondisi realisasi belanja modal pemerintah yang terjadi di Subosukawonosraten dapat disebabkan oleh kebutuhan akan pembangunan infrastruktur berbeda setiap tahunnya dan berbeda di masing – masing daerah. Namun, pertumbuhan realisasi belanja modal pemerintah yang menurun di Kabupaten Klaten dan Sragen, dapat memberikan hambatan pada peningkatan laju pertumbuhan ekonomi di Subosukawonosraten.

1.1.3 Kedungsepur

Kedungsepur merupakan wilayah regionalisasi yang terdiri dari Kabupaten Grobogan, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, Kota Salatiga, dan Kota Semarang. Pada tabel 1.7 akan ditunjukkan kondisi laju pertumbuhan ekonomi di Kedungsepur.

Tabel 1.7
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Bruto
Atas Dasar Harga Konstan 2000 Kabupaten/Kota
Di Kedungsepur Tahun 2007 - 2010 (Persen)

Kabupaten/Kota	2007	2008	2009	2010	Rata - Rata
Kab. Grobogan	4,37	5,33	5,03	5,05	4,93
Kab. Demak	4,15	4,11	4,08	4,12	4,11
Kab. Semarang	4,72	4,26	4,37	4,90	4,56
Kab. Kendal	4,31	4,23	5,58	5,95	4,96
Kota Salatiga	5,39	4,98	4,48	5,01	4,95
Kota Semarang	5,98	5,59	5,34	5,87	5,69
Rata - Rata	4,78	4,72	4,78	5,11	4,84

Sumber: PDRB Kab/Kota Jawa Tengah, BPS Jawa Tengah (diolah)

Pada tabel 1.7, rata – rata laju pertumbuhan ekonomi di Kedungsepur bergerak fluktuatif namun tetap bernilai positif setiap tahunnya. Jika ditinjau dari rata – rata laju pertumbuhan di masing – masing daerah, ada dua kabupaten yang memiliki rata – rata laju pertumbuhan yang lebih kecil dibandingkan rata – rata laju pertumbuhan ekonomi di Kedungsepur, yaitu Kabupaten Demak dan Kabupaten Semarang. Kabupaten/kota lain memiliki rata – rata laju pertumbuhan yang lebih besar dari rata – rata laju pertumbuhan Kedungsepur, yaitu Kabupaten Grobogan, Kendal, Kota Salatiga, dan Kota Semarang. pergerakan rata – rata laju pertumbuhan ekonomi tiap tahunnya bergerak fluktuatif di masing – masing kabupaten/kota di Kedungsepur.

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa pergerakan laju pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kualitas tenaga kerja yang didasari oleh latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh tenaga kerja tersebut. Pendidikan dan keterampilan yang dimiliki tenaga

kerja memiliki pengaruh terhadap produktivitasnya dan laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Maka akan ditunjukkan kondisi tenaga kerja terdidik dan tidak terdidik di Kedungsepur pada tabel 1.8.

Tabel 1.8
Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kedungsepur yang Berumur 15
Tahun Ke Atas yang Termasuk Angkatan Kerja menurut Pendidikan
Tertinggi yang Ditamatkan 2007 – 2010

Kabupaten/Kota	Tenaga Kerja Terdidik					
	2008	Laju (%)*	2009	Laju (%)	2010	Laju (%)
Kab. Grobogan	101.078	-5,08	113.145	11,94	101.273	-10,49
Kab. Demak	121.044	4,71	115.979	-4,18	125.014	7,79
Kab. Semarang	140.994	12,03	141.380	0,27	158.528	12,13
Kab. Kendal	103.103	5,80	115.222	11,75	107.580	-6,63
Kota Salatiga	48.063	0,88	50.013	4,06	45.949	-8,13
Kota Semarang	422.548	7,86	442.121	4,63	458.586	3,72
Rata – Rata		4,37		4,75		-0,27
Kabupaten/Kota	Tenaga Kerja Tidak Terdidik					
	2008	Laju (%)*	2009	Laju (%)	2010	Laju (%)
Kab. Grobogan	604.618	-9,35	654.165	8,19	620.202	-5,19
Kab. Demak	415.009	-8,67	408.960	-1,46	397.252	-2,86
Kab. Semarang	370.776	-5,89	369.562	-0,33	377.676	2,20
Kab. Kendal	411.950	-10,85	403.206	-2,12	365.935	-9,24
Kota Salatiga	39.021	0,15	38.329	-1,77	35.725	-6,79
Kota Semarang	321.891	-9,72	345.444	7,32	337.600	-2,27
Rata – Rata		-7,39		1,64		-4,03

Sumber: Statistik Ketenagakerjaan Jawa Tengah, BPS Jawa Tengah (diolah)

Keterangan: * = Pertumbuhan Tenaga Kerja 2007 – 2008

Tabel 1.8 menunjukkan hanya kabupaten Semarang dan Kota Semarang yang memiliki pertumbuhan tenaga kerja terdidik yang terus meningkat setiap tahunnya. Hal itu menunjukkan bahwa tenaga kerja terdidik dapat terserap di kedua kabupaten/kota tersebut. Untuk di kabupaten/kota lainnya, yaitu di

Kabupaten Grobogan, Demak, Kendal, dan Kota Salatiga, pergerakan pertumbuhan tenaga kerja terdidik terlihat fluktuatif, sama seperti pergerakan rata – rata pertumbuhan tenaga kerja terdidik tiap tahunnya di Kedungsepur. Pada tahun 2008 dan 2009 rata – rata pertumbuhan tenaga kerja terdidik terus meningkat, namun tahun 2010 terjadi penurunan, yang diakibatkan penurunan pertumbuhan tenaga kerja terdidik di tiga kabupaten/kota pada tahun tersebut.

Sedangkan kondisi tenaga kerja tidak terdidik yang ditunjukkan tabel 1.8, memperlihatkan pergerakan yang fluktuatif dari rata – rata pertumbuhan tenaga kerja tidak terdidik di Kedungsepur. Tahun 2008 menunjukkan penurunan rata – rata pertumbuhan yang kemudian meningkat pada tahun 2009. Pada tahun 2010 penurunan kembali terjadi. Untuk kondisi tenaga kerja tidak terdidik di masing – masing kabupaten/kota, terlihat bahwa kabupaten Grobogan memiliki jumlah tenaga kerja tidak terdidik paling besar diantara daerah lainnya. Namun pertumbuhannya bergerak fluktuatif setiap tahunnya, sama seperti kabupaten/kota lainnya.

Selain tenaga kerja yang memberikan kontribusi terhadap peningkatan laju pertumbuhan, pemerintah juga memerankan peranan dalam peningkatan laju pertumbuhan ekonomi melalui pengelolaan pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah yang menyentuh langsung laju pertumbuhan ekonomi adalah belanja modal. Maka pada tabel 1.9 ditunjukkan kondisi realisasi belanja modal pemerintah di Kedungsepur pada periode 2007 – 2010.

Tabel 1.9
Realisasi Belanja Modal Pemerintah dalam Harga Konstan 2000 dan Laju
Pertumbuhannya di Kedungsepur 2007 – 2010 (dalam Ribuan Rupiah)

Kabupaten/ Kota	2008	Laju (%)*	2009	Laju (%)	2010	Laju (%)
Kab. Grobogan	67.718.545	-9,06	36.907.770	-45,50	33.118.679	-10,27
Kab. Demak	41.558.266	-45,01	57.962.762	39,47	45.835.074	-20,92
Kab. Semarang	60.521.668	-6,44	34.725.342	-42,62	27.465.917	-20,91
Kab. Kendal	42.995.702	-23,50	41.989.102	-2,34	48.499.984	15,51
Kota Salatiga	46.642.798	81,20	56.985.143	22,17	32.379.863	-43,18
Kota Semarang	57.183.929	-22,76	82.126.848	43,62	78.197.974	-4,78
Rata - Rata		-4,26		2,47		-14,09

Sumber: Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota, BPS Jawa Tengah dan Biro Keuangan Daerah, Provinsi Jawa Tengah

Keterangan: * = Pertumbuhan Realisasi Belanja Modal 2007 - 2008

Pada tabel 1.9, rata – rata pertumbuhan realisasi belanja modal pemerintah Kedungsepur terlihat fluktuatif. Pada tahun 2008 terjadi penurunan, namun tahun 2009 mengalami peningkatan pertumbuhan realisasi belanja modal, dan tahun 2010 penurunan kembali terjadi. Rata – rata pertumbuhan realisasi belanja modal yang fluktuatif tersebut dapat diakibatkan pertumbuhan realisasi belanja modal yang bergerak fluktuatif di beberapa daerah, yaitu di Kabupaten Demak, Kabupaten Kendal, Kota Salatiga, dan Kota Semarang, namun di kabupaten lainnya, yaitu Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Semarang pertumbuhan tenaga kerja tidak terdidik terus menurun tiap tahunnya. Pertumbuhan fluktuatif menunjukkan adanya perbedaan kebutuhan dalam pembangunan infrastruktur di setiap daerah dan setiap tahunnya, sedangkan pertumbuhan yang terus menurun

menunjukkan kebutuhan akan pembangunan infrastruktur terus menurun, yang dapat menjadi faktor penghambat laju pertumbuhan ekonomi.

1.2 Pernyataan Masalah Penelitian

Barlingmascakeb, Subosukawonosraten, dan Kedungsepur merupakan tiga kawasan strategi yang dibentuk untuk tujuan pembangunan daerah yang lebih merata. Namun, pembentukan wilayah regionalisasi ini dapat menarik daerah maju ke dalam kategori daerah terbelakang, karena mayoritas daerah pendukung berada pada daerah tertinggal, ataupun dapat menyebabkan kejadian yang sebaliknya. Karena itu, penelitian ini dilakukan untuk melihat keberhasilan pembangunan daerah yang dipicu oleh pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi secara teori dapat dipengaruhi oleh kualitas dari tenaga kerja dan realisasi belanja modal. Tenaga kerja yang memiliki pendidikan lebih tinggi akan memiliki produktifitas lebih tinggi daripada tenaga kerja yang tidak memiliki pendidikan atau memiliki pendidikan yang rendah. Belanja modal pemerintah, yang merupakan salah satu komponen belanja pembangunan yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Dengan realisasi belanja modal pemerintah yang proporsional, dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka pertanyaan yang timbul adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh tenaga kerja terdidik, tenaga kerja tidak terdidik, dan realisasi belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah

regionalisasi: Barlingmascakeb, Subosukawonosraten, dan Kedungsepur?

2. Apakah ada kesamaan pola pertumbuhan pada ketiga wilayah regionalisasi: Barlingmascakeb, Subosukawonosraten, dan Kedungsepur?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengidentifikasi dan mengestimasi pengaruh tenaga kerja terdidik, tenaga kerja tidak terdidik, dan realisasi belanja modal pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah regionalisasi: Barlingmascakeb, Subosukawonosraten, dan Kedungsepur.
2. Mendeskripsikan dan membandingkan kesamaan pola pertumbuhan pada ketiga wilayah regionalisasi: Barlingmascakeb, Subosukawonosraten, dan Kedungsepur.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh tenaga kerja terdidik, tenaga kerja tidak terdidik, dan realisasi belanja modal pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah regionalisasi: Barlingmascakeb, Subosukawonosraten, dan Kedungsepur.
2. Untuk mengetahui kesamaan pola pertumbuhan pada ketiga wilayah regionalisasi: Barlingmascakeb, Subosukawonosraten, dan Kedungsepur.

1.5 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini menjelaskan latar belakang mengenai pertumbuhan ekonomi di Barlingmascakeb, Subosukawonosraten, dan Kedungsepur, dimana secara teori pertumbuhan ekonomi dapat dipengaruhi faktor tenaga kerja terdidik, tenaga kerja tidak terdidik, dan realisasi belanja modal pemerintah. Bab ini juga menjelaskan tujuan dan manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini.

Bab II: Telaah Pustaka dan Kerangka Teori Penelitian

Bab ini berisi landasan – landasan teori yang menjadi dasar dan digunakan oleh peneliti untuk penelitian ini berupa teori – teori yang relevan, dan mendukung bagi tercapainya hasil penelitian yang ilmiah. Dasar teori yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian ini adalah teori pertumbuhan ekonomi Neokalsik. Dalam bab ini juga dicantumkan penelitian terdahulu yang merupakan penelitian yang menjadi dasar pengembangan bagi penulisan penelitian ini. Dalam bab ini juga terdapat kerangka pemikiran dan hipotesis.

Bab III: Metode Penelitian

Bab ini berisi deskripsi tentang bagaimana penelitian akan dilaksanakan secara operasional yang menguraikan variabel

penelitian dan definisi operasional. Pada studi ini, digunakan data sekunder dengan jenis data adalah panel data. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan instansi terkait lainnya. Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan model analisis *Least Square Dummy Variable* (LSDV) dan *Random Effect Model* (REM), kemudian menggunakan uji hausman untuk menentukan model yang terbaik.

Bab IV: Hasil dan Pembahasan

Pada bab ini akan dideskripsikan secara singkat keadaan umum seperti geografis, dan pemerintahan. Bab ini juga memuat hasil dan pembahasan analisis data yang menjelaskan hasil estimasi dari penelitian yang dilakukan. Kemudian akan dilakukan interpretasi dari hasil estimasi tersebut. Selain itu, pada bab ini akan dideskripsikan pola pertumbuhan pada ketiga wilayah regionalisasi (Barlingmascakeb, Subosukawonosraten, dan Kedungsepur).

Bab V: Penutup

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari analisis data dan pembahasan. Dalam bab ini juga berisi saran untuk pemegang kebijakan dan keterbatasan pada penelitian ini.

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI PENELITIAN

2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu

2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi menurut Sukirno (2004), adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah yang disebabkan oleh meningkatnya kuantitas dan kualitas faktor – faktor produksi. Investasi akan menambah jumlah barang modal, berkembangnya teknologi yang digunakan, jumlah tenaga kerja yang meningkat karena perkembangan penduduk, dan keahlian tenaga kerja meningkat karena pendidikan.

Pertumbuhan ekonomi dapat juga diartikan sebagai kenaikan GDP/GNP tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak (Arsyad, 1999). Pertumbuhan ekonomi diperlukan, sebagai akibat dari bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya kesejahteraan, sehingga masyarakat membutuhkan barang dan jasa yang lebih banyak (Irawan dan Suparmoko,1992)

Menurut Kuznets (dikutip dari Jhingan, 1996) pertumbuhan ekonomi adalah meningkatnya kemampuan suatu negara untuk menyediakan jenis barang yang lebih banyak yang dibutuhkan masyarakat dalam jangka panjang dan sesuai

dengan kemajuan teknologi serta penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukan agar tercapai peningkatan kemampuan yang dimaksud.

Sukirno (2004), mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, yaitu:

1. Jumlah dan Mutu dari Penduduk dan Tenaga Kerja

Jumlah penduduk yang semakin meningkat disuatu negara dapat menambah jumlah tenaga kerja dan meningkatkan produksi. Disamping itu sebagai akibat pendidikan, latihan, dan pengalaman kerja, keterampilan penduduk akan semakin meningkat, dan akan meningkatkan produktivitas dan selanjutnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

2. Barang – Barang Modal dan Tingkat Teknologi

Peranan barang – barang modal adalah untuk meningkatkan keefisienan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan jumlah barang – barang modal harus diikuti dengan peningkatan teknologi, tanpa adanya perkembangan teknologi, produktivitas barang – barang modal tidak akan mengalami perubahan. Pertambahan barang modal yang diikuti kemajuan teknologi menimbulkan efek positif pada pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi dapat dinilai dengan menggunakan data produk nasional. Produk nasional atau pendapatan nasional adalah istilah yang menerangkan tentang nilai barang dan jasa yang diproduksi suatu negara dalam

suatu tahun tertentu. Dalam konsep yang lebih spesifik pengertian produk nasional dibedakan menjadi dua pengertian yaitu, Produk Nasional Bruto (PNB) dan Produk Domestik Bruto (PDB). PNB adalah produk nasional yang diwujudkan oleh faktor – faktor produksi milik warga negara suatu negara baik yang tinggal di dalam negeri maupun di luar negeri. Sedangkan, PDB adalah produk nasional yang diwujudkan oleh faktor – faktor produksi di dalam negeri (milik warga negara dan warga asing) dalam suatu negara. Kedua konsep tersebut pada hakikatnya merupakan ukuran mengenai besarnya kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa dalam suatu tahun tertentu (Sukirno, 2004).

Untuk menghitung nilai barang dan jasa yang diproduksi suatu negara pada suatu tahun tertentu, dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu (Sukirno, 2004):

1. Cara Pengeluaran

Perhitungan pendapatan nasional dengan cara pengeluaran membedakan pengeluaran ke atas barang dan jasa yang dihasilkan dalam perekonomian pada 4 komponen, yaitu konsumsi, rumah tangga, pengeluaran pemerintah, pembentukan modal swasta (investasi) dan ekspor neto (ekspor dikurangi impor).

2. Cara Produk Neto

Produk neto (*net output*) berarti nilai tambah yang diciptakan dalam suatu proses produksi. Dengan demikian cara produk neto menghitung pendapatan nasional adalah dengan menghitung nilai tambah yang diwujudkan oleh perusahaan – perusahaan di berbagai lapangan usaha dalam perekonomian.

3. Cara Pendapatan

Cara menghitung pendapatan nasional dengan cara pendapatan adalah dengan menjumlahkan berbagai jenis pendapatan dari faktor – faktor produksi. Contohnya, tanah dan harta tetap lainnya memperoleh sewa, tenaga kerja memperoleh upah, modal menghasilkan bunga, dan keahlian wiraswasta memperoleh keuntungan.

2.1.2 Telaah terhadap Teori Pertumbuhan Ekonomi

2.1.2.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi NeoKlasik

Teori pertumbuhan ekonomi NeoKlasik, yang dikemukakan oleh Solow – Swan, memiliki fungsi produksi sederhana sebagai berikut (Boediono, 1981):

$$Y = F (K, L) \dots \dots \dots (2.1)$$

Dimana Y adalah *output*, K adalah kapital atau jumlah modal, dan L adalah tenaga kerja. Fungsi produksi tersebut kemudian di modifikasi oleh Cobb – Douglas yang meneliti tentang pengaruh tenaga kerja dan modal terhadap GDP. Fungsi produksi Cobb - Douglas dinyatakan sebagai berikut (Mankiw, 2006):

$$Y = A K^\alpha L^\beta \dots \dots \dots (2.2)$$

Dimana:

Y : GDP

A : Teknologi

K : Kapital

L : Tenaga Kerja

α : Produk marjinal modal

$\beta (1 - \alpha)$: Produk marjinal tenaga kerja

Fungsi produksi Cobb – Douglas memiliki dua unsur. Pertama, fungsi produksi Cobb – Douglas memiliki skala hasil konstan, yaitu jika modal dan tenaga kerja meningkat dalam proporsi yg sama, maka *output* meningkat menurut proporsi yg sama pula. Unsur lainnya, terlihat dari produk marjinal pada fungsi Cobb – Douglas (Mankiw, 2006):

- Produk marjinal tenaga kerja:

$$MPL = (1 - \alpha)Y/L \dots\dots\dots(2.3)$$

- Produk marjinal modal:

$$MPK = \alpha Y/K \dots\dots\dots(2.4)$$

Persamaan 2.3 dan 2.4 menyatakan bahwa Y/K merupakan produktivitas modal rata – rata dan Y/L merupakan produktivitas tenaga kerja rata – rata. Sedangkan α menyatakan porsi pendapatan yang masuk ke tenaga kerja dan modal. Maka, upah total adalah $MPL \times L$, adalah $(1 - \alpha) Y$, karena itu, $(1 - \alpha)$ adalah output yg dihasilkan tenaga kerja. Demikian pula, pengembalian modal total, $MPK \times K$, adalah αY , dan α adalah bagian output yang dihasilkan modal. Jadi, GDP dihasilkan oleh α , bukan oleh jumlah modal, tenaga kerja, atau teknologi (Mankiw, 2006).

2.1.3 Tenaga Kerja

Mankiw (2006) mengemukakan bahwa marjinal produk tenaga kerja yang mempengaruhi PDRB suatu daerah terbentuk dari rata – rata produktivitas tenaga kerja. Sedangkan produktivitas tenaga kerja dipengaruhi oleh pendidikan yang dimiliki tenaga kerja tersebut (Sumarsono, 2009). Hal itu sama seperti yang dikemukakan oleh Arsyad (1999), bahwa faktor – faktor (pendidikan, jumlah, umur) yang mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan tenaga kerja, akan berpengaruh juga dengan *output* yang dihasilkannya, lebih jauh lagi akan mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi. Kualitas tenaga kerja menurut pendidikan terakhir yang ditamatkan mengakibatkan analisis pasar tenaga kerja dilakukan dalam pendekatan pasar tenaga kerja terdidik dan tidak terdidik. Pasar tenaga kerja terdidik dan tidak terdidik ini membedakan tingkat pendidikan tenaga kerja (Simanjuntak, 1985). Simanjuntak (1985) menuturkan bahwa, tenaga kerja terdidik umumnya datang dari keluarga yang lebih berada, yaitu keluarga yang relatif kaya yang dapat menyekolahkan anak – anaknya ke SMA dan perguruan tinggi. Dari pernyataan Simanjuntak tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa, tenaga kerja terdidik merupakan tenaga kerja dengan pendidikan terakhir (tamat) SMA ataupun perguruan tinggi (diploma atau sarjana, dan jenjang pendidikan di atasnya), sedangkan tenaga kerja dengan pendidikan terakhir (tamat) SD atau SMP, termasuk dalam tenaga kerja tidak terdidik.

Pernyataan Simanjuntak tentang perbedaan tenaga kerja terdidik dan tidak terdidik diperkuat oleh undang – undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 17 ayat 1 dan 2, pasal 18 ayat 1 dan 2 , dan pasal 19

ayat 1 dan 2. Dalam ketiga pasal tersebut disebutkan bahwa SD dan SMP merupakan pendidikan dasar yang melandasi atau sebagai pondasi pendidikan untuk pendidikan yang lebih tinggi, yaitu SMA dan perguruan tinggi. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa, tenaga kerja lulusan SD ataupun SMP hanya mendapatkan pendidikan dasar, maka dikategorikan sebagai tenaga kerja tidak terdidik. Sedangkan, tenaga kerja lulusan SMA yang mendapat pendidikan menengah, dan tenaga kerja lulusan perguruan tinggi yang mendapat pendidikan tinggi, termasuk dalam tenaga kerja terdidik.

2.1.3.1 Hubungan Tenaga Kerja Terdidik dengan Pertumbuhan Ekonomi

Simanjuntak (1985) menyebutkan bahwa dengan tingkat pendidikan yang tinggi, pertumbuhan ekonomi yang terjadi akan lebih cepat. John Kendrick (dalam Simanjuntak, 1985) membuktikan bahwa, sumbangan yang diberikan tenaga kerja yang memiliki pendidikan yang tinggi pada pertumbuhan ekonomi adalah melalui produktivitasnya. Maka pendidikan merupakan investasi bagi terciptanya tenaga kerja yang memiliki produktivitas dan pendapatan yang tinggi. Todaro (2006) mengungkapkan bahwa, kontribusi yang diberikan oleh pendidikan secara ekonomis maupun non ekonomi tidak akan dapat digantikan oleh investasi, walaupun investasi menghasilkan tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi. Karena itu, angkatan kerja terdidik merupakan syarat yang diperlukan bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sama seperti yang dikemukakan oleh Sukirno (2004) yaitu, tersedianya modal saja tidak cukup untuk memodernkan suatu perekonomian, diperlukan berbagai golongan tenaga kerja yang terdidik dan tenaga kerja yang terampil.

Sumbangan positif yang diberikan pendidikan yang semakin meningkat terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi adalah manajemen – manajemen perusahaan modern yang dikembangkan semakin efisien, penggunaan teknologi modern dalam kegiatan ekonomi dapat lebih cepat berkembang, pendidikan yang lebih tinggi meningkatkan daya pemikiran masyarakat, dan tersedianya tenaga ahli yang diperlukan berbagai kegiatan ekonomi (Sukirno, 2004). Hal tersebut ditegaskan oleh Todaro (2006) yang menyebutkan bahwa, lebih banyak penduduk yang memiliki pendidikan tinggi akan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui terciptanya angkatan kerja yang lebih produktif, tersedianya kesempatan kerja yang lebih luas, terciptanya kelompok pemimpin terdidik, dan terciptanya sikap – sikap modern di berbagai lapisan masyarakat.

2.1.3.2 Hubungan Tenaga Kerja Tidak Terdidik dengan Pertumbuhan Ekonomi

Tingginya jumlah tenaga kerja yang memiliki pendidikan rendah diakibatkan oleh pendidikan yang mahal dan kemiskinan yang terjadi di negara – negara dunia ketiga seperti Indonesia. Hal tersebut mencerminkan sistem pendidikan yang ada di negara berkembang tidak mendukung penduduk yang berpenghasilan rendah sehingga sulit untuk meneruskan sekolah anak – anaknya pada jenjang yang lebih tinggi. Hal itu diakibatkan oleh efek pendidikan formal yang memiliki korelasi positif terhadap pendapatan seseorang selama hidupnya (Todaro, 2006). Maka dari itu, kebanyakan penduduk di negara berkembang seperti Indonesia masuk dalam kategori tenaga kerja tidak terdidik, karena biaya

– biaya yang relatif tinggi dan manfaatnya yang rendah bagi anak – anak dari keluarga miskin.

Menurut Todaro (2006), ada alasan – alasan yang menyebabkan biaya pendidikan relatif tinggi dan manfaatnya yang rendah bagi anak – anak dari keluarga miskin:

1. Tingginya biaya oportunitas tenaga kerja yang harus ditanggung keluarga miskin jika anaknya bersekolah.
2. Proses keuangan di sekolah dan biaya yang lebih mahal pada tingkat sekolah menengah lanjutan akan menekan atau memperkecil jumlah anak – anak dari keluarga miskin untuk mendapatkan pendidikan yang memadai.

Alasan – alasan tersebut yang diduga menyebabkan tingginya tenaga kerja berpendidikan rendah di negara berkembang, yang berdampak pada rendahnya produktivitas dan *output* yang dihasilkan, sehingga laju pertumbuhan ekonomi bergerak lebih lambat. Produktivitas yang rendah menyebabkan tingkat pendapatan yang rendah, yang dapat menurunkan kesejahteraan penduduk dan tersendatnya pembangunan daerah. Agar dapat memperbesar tingkat pertumbuhan ekonomi dan dapat meningkatkan taraf hidup bangsa, diperlukan perluasan pendidikan yang dapat diakses semua kalangan masyarakat (Simanjuntak, 1985).

2.1.4 Realisasi Belanja Modal Pemerintah

Marjinal produk kapital yang mempengaruhi PDRB suatu daerah terbentuk melalui produktivitas modal rata – rata (Mankiw, 2006). Investasi modal dalam penelitian ini merupakan investasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk

meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal. Belanja modal pemerintah merupakan bagian dari belanja langsung yang dipergunakan untuk menambah aset yang bersifat sosial dan/atau ekonomi yang memberi manfaat lebih dari satu tahun. Aset tersebut merupakan perwujudan dari produktivitas yang dihasilkan oleh belanja modal.

Produktivitas belanja modal dapat diukur melalui realisasi belanja modal yang berbentuk data nominal. Belanja modal diklasifikasikan dalam dua kelompok, kelompok pertama adalah belanja publik yaitu belanja yang manfaatnya dapat langsung dinikmati masyarakat, antara lain pembangunan jembatan, pembelian modil ambulan, dan berbagai pembangunan atau belanja yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Kelompok kedua adalah belanja aparatur, yaitu belanja yang manfaatnya tidak dinikmati langsung oleh masyarakat tetapi dapat dirasakan langsung oleh apartur (Sularso, 2011).

2.1.4.1 Hubungan Belanja Modal Pemerintah dengan Pertumbuhan

Ekonomi

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yg dapat dirasakan setiap kalangan, pemerintah harus berperan serta dalam investasi, untuk meningkatkan bidang – bidang ekonomi eksternal yang mengarah pada penciptaan overhead sosial dan ekonomi yang mengarah seperti tenaga kerja, trnasportasi, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya (Jhingan, 1996). Sama seperti yang diungkapkan oleh Sularso (2011) yang menyatakan bahwa, kemajuan suatu daerah dapat ditunjukkan salah satunya dengan pertumbuhan ekonomi yang baik, dimana salah

satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah investasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Investasi pemerintah dalam bidang sosial dan/ekonomi adalah belanja modal, yang menghasilkan barang – barang yang dapat dinikmati masyarakat. Barang – barang modal yang dihasilkan belanja modal dapat meningkatkan keefisienan pertumbuhan ekonomi (Sukirno, 2004), selain itu, belanja modal juga salah satu faktor yang dapat mempertahankan pertumbuhan ekonomi dari terjangan krisis ekonomi (Ratnawati dalam Metronews, 2012).

Untuk mencapai peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal yang menjadi salah satu komponen pengeluaran pemerintah membutuhkan perhitungan yang tepat agar tidak terjadi kemunduran atau muncul hambatan pada pertumbuhan ekonomi. Seperti halnya yang dikemukakan oleh Anaman (dikutip dalam Rustiono, 2008) bahwa pengeluaran pemerintah yang terlalu kecil akan merugikan pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah yang proporsional akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan pengeluaran pemerintah yang boros akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah (Mangkoesubroto, 2008), artinya belanja modal merupakan salah satu usaha pemerintah untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi.

2.1.5 Pola Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Sumitro (dikutip dari Ni Komang Erawati dan I Nyoman Mahaendra, 2012), pertumbuhan ekonomi bersangkutan paut dengan proses pembangunan yang berdimensi tunggal dan diukur dengan meningkatnya hasil

produksi dan hasil pendapatan. Perbedaan pertumbuhan ekonomi akan membawa masing – masing daerah membentuk suatu pola pertumbuhan dimana dapat digolongkan dalam klasifikasi tertentu untuk mengetahui potensi relatif perekonomian suatu daerah yang dapat dilihat dengan menggunakan analisis *Klassen Typology*.

2.2 Penelitian Terdahulu

1. Adi Raharjo melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Investasi Swasta, dan Angkatan Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Tahun 1982 – 2003 (Studi Kasus di Kota Semarang)”. Kelemahan dalam penelitian ini variabel angkatan kerja hanya dibedakan menjadi angkatan kerja yang bekerja dan tidak bekerja. Masih banyak jenis angkatan kerja yang dapat mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi, seperti, angkatan kerja terdidik dan tidak terdidik, angkatan kerja formal dan informal, dan angkatan kerja yang dibedakan menurut usia.
2. Bambang Sulistiyono melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pertumbuhan Angkatan Kerja Terdidik, Pertumbuhan Tabungan Masyarakat, Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah pada Pertumbuhan Ekonomi Regional Periode 1993.1 – 2006.4”. Kelemahan dalam penelitian ini adalah, pengaruh yang diperlihatkan hanya dari angkatan terdidik saja, tidak memperlihatkan pengaruh dari sisi angkatan kerja tidak terdidik. Selain itu, variabel pertumbuhan pengeluaran pemerintah hanya memperlihatkan dari sisi pengaruh pengeluaran pembangunan

saja, walaupun pengeluaran pembangunan merupakan salah satu pengeluaran pemerintah yang menyentuh langsung laju pertumbuhan ekonomi, namun ada komponen pengeluaran pemerintah lainnya yang juga mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi, yaitu pengeluaran rutin.

3. Elizabeth Tiur Manurung melakukan penelitian dengan judul “Peranan Pendidikan dalam Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia 1969 – 1993”. Kelemahan dalam penelitian ini adalah pengaruh yang diperlihatkan terhadap pertumbuhan ekonomi hanya terbatas pada kualitas tenaga kerja atau tinggi – rendahnya pendidikan yang diterima tenaga kerja, penelitian tersebut belum memperlihatkan pendidikan tenaga kerja berdasarkan usia.
4. Norista Gathama Putra melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Belanja Modal dan Belanja Operasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah”. Kelemahan dalam penelitian ini adalah, periode penelitian yang relatif singkat, yaitu, hanya 4 tahun. Selain itu, model yang dikembangkan dalam penelitian ini masih terbatas pada pengaruh belanja modal dan belanja operasi terhadap laju pertumbuhan ekonomi. masih banyak faktor – faktor lainnya yang juga dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, seperti investasi swasta, tenaga kerja, aglomerasi, netto ekspor, penerimaan daerah, dan prasarana perhubungan guna menunjang mobilitas barang.

5. Ni Komang Erawati dan I Nyoman Mahaendra Yasa melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pola Pertumbuhan Ekonomi Dan Sektor Potensial Kabupaten Klungkung”. Kelemahan dalam penelitian ini periode penelitian yang relatif sempit, sehingga tidak bisa melihat tren yang lebih panjang.

2.3 Kerangka Pemikiran Penelitian

Penelitian ini didasarkan pada model pertumbuhan ekonomi NeoKlasik, dengan model sederhana berikut ini (Mankiw, 2006):

$$Y = F(K, L) \dots \dots \dots (2.5)$$

Dimana:

Y = *Output*

K = Kapital

L = Tenaga kerja

Model pertumbuhan ekonomi NeoKlasik mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi bersumber dari satu atau lebih, dari tiga faktor berikut ini: kenaikan kuantitas dan kualitas tenaga kerja (melalui pertumbuhan penduduk dan perbaikan pendidikan), penambahan modal (melalui tabungan dan investasi), serta penyempurnaan teknologi (Todaro, 2006). Untuk mengetahui pengaruh yang diberikan tenaga kerja dan modal terhadap GDP, Cobb – Douglas memodifikasi model pertumbuhan ekonomi NeoKlasik seperti pada persamaan 2.6 berikut ini (Mankiw, 2006):

$$Y = A K^\alpha L^\beta \dots \dots \dots (2.6)$$

Dimana:

Y : GDP

A : Teknologi

K : Kapital

L : Tenaga Kerja

α : Produk marjinal kapital

$\beta (1 - \alpha)$: Produk marjinal tenaga kerja

Telah dijelaskan bahwa laju pertumbuhan ekonomi menurut Cobb – Douglas dipengaruhi oleh produktivitas yang disimbolkan oleh α (Mankiw, 2006). Dalam penelitian ini pertumbuhan masing – masing tiga wilayah regionalisasi dinyatakan dalam (Y); sedangkan produktivas tenaga kerja dilihat melalui: Tenaga kerja terdidik (TKT), Tenaga Kerja Tidak Terdidik (TKTT), dan produktivitas investasi modal yang dilakukan pemerintah dilihat melalui: Realisasi Belanja Modal Pemerintah (RBM). Sehingga diperoleh persamaan 2.7:

$$Y_{it} = \alpha_0 + \alpha_{1it} TKT_{itn} + \alpha_{2it} TKTT_{itn} + \alpha_{3it} RBM_{itn} \dots \dots \dots (2.7)$$

Dimana :

Y : Laju pertumbuhan ekonomi

α_0 : Konstanta

$\alpha_1 - \alpha_3$: Marjinal produk

- TKT* : Tenaga kerja terdidik
- TKTT* : Tenaga kerja tidak terdidik
- RBM* : Realisasi belanja modal pemerintah
- i* : 1 – 3: 1 = Barlingmascakeb; 2 = Subosukawonosraten; 3 = Kedungsepur
- t* : 1 – 4: 1 = 2007; 2 = 2008; 3 = 2009; 4 = 2010
- n* : Jumlah kabupaten pada setiap wilayah regionalisasi: Barlingmascakeb, Subosukawonosraten, dan Kedungsepur

Jumlah tenaga kerja terdidik, tenaga kerja tidak terdidik, dan realisasi belanja modal pemerintah di Barlingmascakeb, Subosukawonosraten, dan Kedungsepur selama periode pengamatan 2007 – 2010 dijadikan variabel bebas yang secara parsial atau bersama – sama diduga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Barlingmascakeb, Subosukawonosraten, dan Kedungsepur.

2.4 Hipotesis

1. Hubungan Y – TKT

$$H_{\alpha} = \frac{\partial Y_{it}}{\partial TKT_{it}} > 0: \text{Tenaga kerja terdidik di wilayah regionalisasi } i$$

pada tahun t berpengaruh positif terhadap laju pertumbuhan ekonomi di wilayah regionalisasi i pada tahun t .

2. Hubungan Y – $TKTT$

$H_{\alpha} = \frac{\partial Y_{it}}{\partial TKTT_{it}} > 0$: Tenaga kerja tidak terdidik wilayah regionalisasi i pada tahun t berpengaruh positif terhadap laju pertumbuhan ekonomi wilayah regionalisasi i pada tahun t.

3. Hubungan Y – RBM

$H_{\alpha} = \frac{\partial Y_{it}}{\partial RBM_{it}} > 0$: Realisasi belanja modal pemerintah wilayah regionalisasi i pada tahun t berpengaruh positif terhadap laju pertumbuhan ekonomi wilayah regionalisasi i pada tahun t.

Keterangan:

i : 1 – 3: 1 = Barlingmascakeb; 2 = Subosukawonosraten; 3 = Kedungsepur

t : 1 – 4: 1 = 2007; 2 = 2008; 3 = 2009; 4 = 2010

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Variabel dalam penelitian ini, adalah laju pertumbuhan ekonomi sebagai variabel dependen, tenaga kerja terdidik, tenaga kerja tidak terdidik, dan realisasi belanja modal pemerintah sebagai variabel independen. Untuk memperjelas, berikut ini merupakan definisi operasional variabel – variabel tersebut:

a. Variabel terikat/dependen

Dalam penelitian ini digunakan variabel dependen yang mencerminkan indikator pertumbuhan ekonomi regional yaitu:

▪ Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi ditunjukkan oleh laju pertumbuhan PDRB atas dasar konstan tahun dasar 2000, pada kabupaten/kota di Barlingmascakeb, Subosukawonosraten, dan Kedungsepur pada tahun 2007 – 2010 (dalam jutaan rupiah). Laju Pertumbuhan PDRB dapat dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut (BPS, 2010):

$$GR = \frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \times 100\% \dots \dots \dots (3.1)$$

Keterangan:

GR : Laju pertumbuhan ekonomi (persen)

$PDRB_t$: PDRB tahun t

$PDRB_{t-1}$: PDRB tahun sebelumnya

b. Variabel Bebas/Independen

Variabel independen atau variabel mengikat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Tenaga Kerja Terdidik

Tenaga kerja terdidik dihitung dari jumlah penduduk yang berumur 15 tahun keatas yang termasuk angkatan kerja berdasarkan pendidikan terakhir SLTA atau sederajat dan diploma atau strata atau jenjang pendidikan di atasnya di kawasan Barlingmascakeb, Subosukawonosraten, dan Kedungsepur pada tahun 2007 – 2010 (dalam satuan orang) (Simanjuntak, 1985).

- Tenaga Kerja Tidak Terdidik

Tenaga kerja tidak terdidik dihitung dari jumlah penduduk yang berumur 15 tahun keatas yang termasuk angkatan kerja berdasarkan pendidikan terakhir SD, dan SMP atau tidak/belum tamat SD dan tidak/belum pernah sekolah di kawasan Barlingmascakeb, Subosukawonosraten, dan Kedungsepur pada tahun 2007 – 2010 (dalam satuan orang) (Simanjuntak, 1985).

- Realisasi Belanja Modal Pemerintah Atas Dasar Harga Konstan 2000

Realisasi belanja modal pemerintah diperoleh dari realisasi belanja modal tiap kabupaten/kota di Barlingmascakeb, Subosukawonosraten, dan Kedungsepur pada tahun 2007 – 2010 (dalam ribuan rupiah)

dihitung dengan cara deflasi menggunakan indeks harga perdagangan besar (IPHB) umum tanpa ekspor sebagai deflatornya. Dengan menggunakan formula sebagai berikut (Dajan, 1995):

$$RCE = \frac{NCE}{PI} \times 100 \dots \dots \dots (3.2)$$

Keterangan:

RCE : Realisasi belanja modal riil

NCE : Nominal realisasi belanja modal riil

PI : Indeks harga

c. Dummy Wilayah

Dalam analisis regresi, variabel dependen tidak hanya dipengaruhi oleh variabel independennya saja (dalam hal ini jumlah tenaga kerja terdidik dan tidak terdidik, dan realisasi belanja modal pemerintah), tetapi juga oleh variabel tambahan yang tidak berubah seiring waktu atau variabel yang menunjukkan keunikan atau heterogenitas setiap daerah. Variabel ini disebut *dummy*. Tujuan dari pemberian heterogenitas atau variabel *dummy* dalam penelitian ini, untuk menandakan seberapa besar perbedaan antara satu daerah dengan *benchmark* yang dipilih. Variabel *dummy* ditunjukkan dengan angka 0 dan 1. Dimana 1 untuk daerah *benchmark* dan 0 bukan daerah *benchmark* (contoh: bukan Cilacap) (Gujarati, 2012). Dalam penelitian ini *benchmark* untuk Barlingmascakeb

adalah Kabupaten Cilacap yang disimbolkan dengan DUM1, untuk Subosukawonosraten adalah Kota Surakarta disimbolkan dengan DUM7, dan untuk Kedungsepur adalah Kota Semarang disimbolkan dengan DUM6. *Benchmark* dalam penelitian ini dipilih berdasarkan daerah yang menjadi pusat pertumbuhan di masing – masing wilayah regionalisasi.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari laporan – laporan para peneliti terdahulu atau dari perpustakaan (Hasan, 2002). Bentuk data dalam penelitian ini adalah panel, yaitu perpaduan antara data *time series* dengan data *cross section*. Menurut Gujarati (2012), keunggulan dari penggunaan data panel dalam penelitian ini adalah:

- a. Teknik estimasi data panel dapat mengatasi heterogenitas karena memberikan variabel spesifik – subjek.
- b. Penggabungan data *time series* dan *cross section* akan menghasilkan data yang lebih informatif, bervariasi, mengurangi keterkaitan antar variabel dan mempunyai derajat kebebasan yang lebih besar serta lebih efisien.
- c. Dengan mempelajari observasi *cross section* secara berulang-ulang, data panel lebih cocok mempelajari perubahan yang dinamis.
- d. Dapat menjelaskan dan mendeteksi pengaruh – pengaruh yang tidak bisa dijelaskan oleh data *time series* dan *cross-section* saja.

- e. Data panel dapat digunakan untuk mempelajari perilaku model yang lebih kompleks.
- f. Data panel dapat meminimalisasi bias.

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa sumber, antara lain:

- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah dalam beberapa terbitan.
- Biro Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

- a. Data laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan 2000 setiap kabupaten/kota di Barlingmascakeb, Subosukawonosraten, dan Kedungsepur tahun 2007 – 2010.
- b. Data tenaga kerja berdasarkan pendidikan terakhir yang ditamatkan setiap kabupaten/kota di Barlingmascakeb, Subosukawonosraten, dan Kedungsepur tahun 2007 – 2010.
- c. Data realisasi belanja modal pemerintah setiap kabupaten/kota di Barlingmascakeb, Subosukawonosraten, dan Kedungsepur tahun 2007 – 2010.

3.3 Metode Pengambilan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi, sehingga tidak diperlukan teknik sampling serta kuesioner. Studi dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen. Dokumen yang dapat digunakan

berupa buku harian, surat pribadi, laporan notulen rapat, catatan kasus dalam pekerjaan sosial dan dokumen lainnya (Hasan, 2002).

3.4 Metode Analisis

Lexy J. Moleong (dalam Hasan, 2002) menuturkan bahwa analisis data adalah proses mengorganisasikan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema kemudian dapat dirumuskan hipotesis seperti yang diproyeksikan oleh data. Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif dalam penelitian ini memiliki beberapa tahapan yang terdiri atas, spesifikasi model, uji statistik, dan uji asumsi klasik.

3.4.1 Spesifikasi Model

Untuk melihat pengaruh dari faktor tenaga kerja terdidik, tenaga kerja tidak terdidik, dan realisasi belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi di masing – masing kawasan startegis (Barlingmascakeb, Subosukawonosraten, dan Kedungsepur), maka digunakan alat analisis regresi dengan menggunakan program Eviews 6.0. Adapun persamaan yang digunakan berdasarkan teori NeoKlasik yang dinyatakan sebagai berikut (Mankiw, 2006):

$$Y = F (K, L).....(3.3)$$

Dimana:

Y = *Output*

K = Kapital

L = Tenaga kerja

Jika persamaan 3.3 diterapkan dalam penelitian ini, K merupakan realisasi modal yang dikeluarkan oleh pemerintah yang disebut realisasi belanja modal pemerintah. Sedangkan L adalah tenaga kerja yang dibedakan menjadi tenaga kerja terdidik dan tenaga kerja tidak terdidik. Sehingga persamaan 3.3 dapat dituliskan kembali sebagai berikut:

$$Y_{it} = f(TKT_{it}, TKTT_{it}, RBM_{it}) \dots\dots\dots(3.4)$$

Cobb – Douglas memodifikasi formula NeoKlasik untuk mengetahui pengaruh yang diberikan tenaga kerja dan modal terhadap GDP. Fungsi produksi Cobb - Douglas dinyatakan sebagai berikut (Mankiw, 2006):

$$Y = A K^{\alpha} L^{\beta} \dots\dots\dots(3.5)$$

Dimana:

Y : GDP

A : Teknologi

K : Kapital

L : Tenaga Kerja

α : Produk marjinal kapital

$\beta (1 - \alpha)$: Produk marjinal tenaga kerja

Menurut Cobb – Douglas (dalam Mankiw, 2006) menyatakan bahwa GDP dihasilkan oleh α , bukan oleh jumlah modal, tenaga kerja, atau teknologi. Jika

diterapkan dalam model Ekonometrika *fixed effect model*, dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha_0 + \alpha_{1it} TKT_{itn} + \alpha_{2it} TKTT_{itn} + \alpha_{3it} RBM_{itn} + \beta_1 DUM_1 + \beta_2 DUM_2 + \beta_3 DUM_3 + \dots \beta_i DUM_i + u_t \dots \dots \dots (3.6)$$

Dimana :

Y : Laju pertumbuhan ekonomi

α_0 : Intersep

$\alpha_1 - \alpha_3$: Marjinal produk

$\beta_1 - \beta_i$: Koefesien dummy

TKT : Tenaga kerja terdidik

TKTT : Tenaga kerja tidak terdidik

RBM : Realisasi belanja modal pemerintah

$DUM_1 - DUM_i$: Dummy

u_i : Nilai residual (faktor pengganggu) yang berada di luar model

i : 1 – 3: 1 = Barlingmascakeb; 2 = Subosukawonosraten; 3 = Kedungsepur

t : 1 – 4: 1 = 2007; 2 = 2008; 3 = 2009; 4 = 2010

n : Jumlah kabupaten pada setiap wilayah regionalisasi:
Barlingmascakeb, Subosukawonosraten, dan Kedungsepur

3.5 Pengujian Statistik Analisis Regresi

Uji signifikansi merupakan prosedur yang digunakan untuk menguji diterima atau ditolaknya (secara statistik) hipotesis nol (H_0) dari sampel. Keputusan untuk mengolah H_0 dibuat berdasarkan nilai uji statistik yang diperoleh dari data yang ada (Gujarati, 2012).

3.5.1 Koefisien Determinasi R^2 (*Goodness of Fit*)

Koefisien determinasi R^2 menunjukkan seberapa baik sebuah regresi sampel sesuai dengan datanya atau seberapa dekat garis regresi yang diestimasi dengan data yang sebenarnya. Nilai R^2 dapat diperoleh dengan formula sebagai berikut:

$$R^2 = \frac{\beta_2 \sum y_i x_{2i} + \beta_3 \sum y_i x_{3i} + \dots + \beta_n \sum y_i x_{ni}}{\sum y_i^2} \dots \dots \dots (3.5)$$

Nilai berkisar antara nol dan satu ($0 \leq R^2 \leq 1$). jika nilai R^2 bernilai 1 atau mendekati 1, artinya kesesuaian garisnya tepat atau terdapat hubungan antara regresan (variabel dependen) dan regresor (variabel independen). Sebaliknya, jika nilai R^2 bernilai nol atau mendekati nol, artinya tidak ada hubungan antara regresan dan regresor (Gujarati, 2012).

3.5.2 Pengujian Hipotesis

3.5.2.1 Pengujian Hipotesis Koefisien Regresi Individual (Uji t)

Uji statistik t digunakan untuk menguji hipotesis mengenai setiap koefisien regresi parsial *individual* atau untuk menunjukkan seberapa jauh

pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai t dapat diperoleh dari formula berikut ini (Gujarati, 2012):

$$t = \frac{\hat{\alpha}_2 - \alpha_2}{se(\hat{\alpha}_2)} \dots \dots \dots (3.6)$$

Untuk hipotesis dari uji t disajikan sebagai berikut:

Hubungan Y – TKT:

$H_0 : \alpha_1 = 0$: Tenaga kerja terdidik tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

$H_a : \alpha_1 > 0$: Tenaga kerja terdidik berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Hubungan Y - TKTT

$H_0 : \alpha_2 = 0$: Tenaga kerja terdidik tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

$H_a : \alpha_2 > 0$: Tenaga kerja terdidik berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Hubungan Y – RBM

$H_0 : \alpha_3 = 0$: Realisasi belanja modal pemerintah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

$H_a : \alpha_3 > 0$: Realisasi belanja modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Untuk menguji hipotesis nol, dapat menggunakan uji t dengan membandingkan t statistic dengan t table dengan tingkat signifikan yang telah ditentukan, dalam penelitian ini telah ditentukan tingkat signifikan sebesar 10%. Jika nilai t statistic melebihi t table pada tingkat signifikan yang dipilih, maka hipotesis nol dapat ditolak, jika yang terjadi sebaliknya, maka hipotesis nol tidak dapat ditolak (Gujarati 2012).

3.5.2.2 Pengujian Signifikansi Keseluruhan (Uji F)

Uji F adalah uji signifikan keseluruhan dari garis regresi yang diestimasi, adalah untuk mengetahui apakah Y secara linear berhubungan baik atau seberapa besar pengaruhnya terhadap X_2 dan X_3 atau pengujian terhadap variabel – variable independen secara simultan apakah memiliki pengaruh terhadap variabel independen. Nilai F hitung dapat diketahui melalui formula sebagai berikut :

$$F = \frac{R^2 / (k-1)}{1-R^2 / (n-k)} \dots\dots\dots(3.7)$$

Dimana:

R^2 : Koefisien determinasi

n : Jumlah observasi

k : Jumlah variabel penjelas termasuk konstanta

Hipotesis pada uji F ini adalah sebagai berikut:

$H_0 : \alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = 0$: Ketiga variabel independen (TKTT, TKT, RBM) secara simultan atau bersama – sama tidak mempengaruhi variabel yang dijelaskan.

$H_a : \alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 > 0$: Ketiga variabel independen (TKTT, TKT, RBM) secara simultan atau bersama – sama mempengaruhi variabel yang dijelaskan.

Pada tingkat signifikan 10%, apabila *F statistic* kurang dari *F table* maka H_0 diterima dengan kata lain variabel penjelas secara simultan atau bersama-sama tidak mempengaruhi variabel yang dijelaskan secara signifikan. begitupun sebaliknya, apabila *F statistic* lebih besar dari *F table* pada tingkat signifikan 10% maka H_0 ditolak dengan kata lain variabel penjelas secara simultan dan bersama-sama mempengaruhi variabel yang dijelaskan secara signifikan (Gujarati, 2012).

3.6 Uji Asumsi Klasik

Pengujian penyimpangan asumsi klasik dimaksudkan untuk menjamin bahwa model yang diestimasi bebas dari gangguan multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedasitas. Untuk melihat distribusi data dalam model regresi, dilakukan uji normalitas. Pengujian penyimpangan asumsi klasik dalam penelitian ini menggunakan Eviews 6. Pengujian terhadap gangguan - gangguan tersebut adalah sebagai berikut:

3.6.1 Uji Normalitas

Uji normalitas adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui apakah residual (faktor gangguan) terdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki nilai residual yang terdistribusi secara normal. Apabila terjadi distribusi residual yang tidak normal, maka model tidak memenuhi asumsi *unbias*. Untuk mendeteksi normal atau tidaknya distribusi residual, dapat melakukan pendeteksian dengan uji *Jarque – Bera*, dengan hipotesis sebagai berikut:

H_0 : Residual terdistribusi normal

H_a : Residual tidak terdistribusi normal

Jika nilai probabilitas dalam aplikasi JB statistik cukup rendah (bisa dikatakan kurang dari α yang telah ditentukan) maka H_0 ditolak, jika yang terjadi sebaliknya (bisa dikatakan lebih dari α yang telah ditentukan) maka H_0 dapat diterima (Gujarati, 2012).

3.6.2 Deteksi Multikolinearitas

Multikolinearitas muncul jika terdapat hubungan yang sempurna ataupun hubungan tidak sempurna di antara beberapa variabel atau semua variabel independen dalam model. Pada kasus multikolinearitas yang serius, koefisien regresi tidak lagi menunjukkan pengaruh murni dari variabel independen dalam model (tidak bersifat estimator). Terdapat beberapa metode untuk mendeteksi keberadaan multikolinearitas, salah satunya adalah dengan pemeriksaan korelasi parsial, karena korelasi parsial dapat melibatkan lebih dari dua variabel independen atau *zero-order* (Gujarati, 2012). Langkah korelasi parsial untuk mengukur multikolinearitas adalah dengan membandingkan R^2 regresi utama dengan R^2 regresi tiap variabel - variabel independen. Jika R^2 regresi utama lebih besar dari R^2 regresi tiap variabel - variabel independen, maka variabel – variabel independen bebas dari multikolinearitas. Jika yang terjadi R^2 regresi utama lebih kecil dari R^2 regresi tiap variabel - variabel independen, maka terdapat multikolinearitas pada variabel – variabel independen yang digunakan. Apabila terjadi multikolinearitas diantara variabel – variabel independen yang digunakan, maka, salah satu tindakan yang dapat dilakukan adalah tidak melakukan apa pun.

Hal tersebut dikemukakan oleh Blanchard (dalam Gujarati, 2012), bahwa “multikolinearitas adalah kehendak Tuhan, bukan masalah dengan OLS atau teknik statistik pada umumnya.” Gujarati (2012) juga menambahkan, bahwa hal ini dilakukan (tidak melakukan apapun) karena, tidak ada yang dapat dilakukan lagi terhadap data yang tersedia bagi analisis empiris.

3.6.3 Deteksi Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah kondisi dimana varians dari setiap faktor gangguan (residual) tidak bersifat konstan. Gejala heteroskedastisitas lebih sering dalam data *cross section* dari pada *time series*. Selain itu juga sering muncul dalam analisis yang menggunakan data rata – rata. Apabila terdapat heteroskedastisitas, maka asumsi yang terjadi tetap *unbias* tetapi tidak lagi efisien. Untuk mendeteksi heteroskedastisitas dapat melakukan uji *white*. Uji *white* tidak bergantung pada asumsi normalitas dan mudah untuk diimplementasikan (Gujarati 2012), dengan hipotesis sebagai berikut:

H_0 : Tidak ada heteroskedastisitas

H_a : Ada heteroskedastisitas

Jika nilai *prob. Chi square* dari *Obs*R – Square* lebih dari nilai α , maka H_0 dapat diterima, atau tidak terdapat heteroskedastis. Jika yang terjadi sebaliknya, yaitu nilai *prob. Chi square* dari *Obs*R – Square* kurang dari nilai α , maka H_0 tidak dapat diterima, atau terdapat heteroskedastis.

3.6.4 Deteksi Autokorelasi

Autokorelasi atau adanya korelasi antar anggota seri dari observasi – observasi yang diurutkan berdasarkan waktu (seperti pada data time series) atau tempat (seperti pada data cross section). Autokorelasi pada umumnya lebih sering terjadi pada data *time series* walaupun dapat juga terjadi pada data *cross section*. Dalam data *time series* observasi diurutkan menurut urutan waktu secara kronologis. Maka dari itu besar kemungkinan akan terjadi interkorelasi antara observasi yang berurutan, khususnya kalau interval antara dua observasi sangat pendek. Apabila terdapat autokorelasi pada seri dari observasi, akan menyebabkan hasil uji yang tidak bersifat estimator terbaik (walaupun linier dan tidak bias) (Gujarati, 2012). Untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi dapat menggunakan uji BG (Breusch – Godfrey) atau dikenal sebagai uji lagrange multiplier (*LM test*). Jika dibandingkan dengan uji Durbin Watson (uji DW), uji BG memiliki kelebihan yang tidak dimiliki uji DW yaitu regresor – regresor yang dilibatkan ke dalam model regresi dapat mengandung nilai-nilai masa lalu, dari regresi Y. Uji autokorelasi memiliki hipotesis sebagai berikut:

H_0 : Tidak terdapat autokorelasi

H_a : Terdapat autokorelasi

Jika nilai *prob. Chi square* dari *Obs*R – Square* lebih dari nilai α , maka H_0 dapat diterima, atau tidak terdapat autokorelasi. Jika yang terjadi sebaliknya, yaitu nilai *prob. Chi square* dari *Obs*R – Square* kurang dari nilai α , maka H_0 tidak dapat diterima, atau terdapat autokorelasi.

3.7 Analisis Pola Pertumbuhan Ekonomi

Analisis pola pertumbuhan ekonomi menggunakan Tipologi *Klassen* yang secara rinci dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3.1
Klasifikasi Pola Pertumbuhan Ekonomi
Menurut Tipologi *Klassen*

PDRB per Kapita (y) Laju Pertumbuhan (r)	$y_{di} > y_{ni}$ (+) (tinggi)	$y_{di} < y_{ni}$ (-) (rendah)
$r_{di} > r_{ni}$ (+) (tinggi)	Tipe I Daerah Makmur	Tipe II Daerah tertinggal dalam proses membangun
$r_{di} < r_{ni}$ (-) (rendah)	Tipe III Daerah makmur yang sedang menurun (potensial untuk tertinggal)	Tipe IV Daerah tertinggal

Sumber : Arsyad, 1999

Keterangan :

r_{di} : laju pertumbuhan PDRB wilayah regionalisasi (Barlingmascakeb,

Subosukawonosraten, atau Kedungsepur)

r_{ni} : laju pertumbuhan PDRB Provinsi Jawa Tengah

y_{di} : PDRB per kapita wilayah regionalisasi (Barlingmascakeb,

Subosukawonosraten, atau Kedungsepur)

y_{ni} : PDRB per kapita Provinsi Jawa Tengah